

Edisi Revisi

EKOLOGI

ADMINISTRASI NEGARA



ISBN 978-602-1685-76-1



Agus Sya'bani Arlan
Ni Made Musiyani Anjasmari

Edisi Revisi



EKOLOGI

ADMINISTRASI

NEGARA

Agus Sya'bani Arlan
Ni Made Musiyani Anjasmari

Penerbit
CV. Hemat Publishing

Ekologi Administrasi Negara (edisi revisi)

Penulis :

AGUS SYA'BANI ARLAN

NI MADE MUSIYANI ANJASMARI

Perancang Sampul: Tim Penerbit

Lay out : Tim Penerbit

Diterbitkan oleh:

CV. HEMAT Publishing

Amuntai Kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-1685-76-1

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penulis & Penerbit

Dicetak oleh:

Percetakan HEMAT

Jl. Pembalah Batung Paliwara Amuntai Hulu Sungai Utara

Kalimantan Selatan HP. 0852 4851 8739

email: hemat.faidzal@yahoo.co.id

Edisi Revisi

KATALOG DALAM TERBITAN

Ekologi Adminstrasi Negara (Edisi Revisi)

oleh AGUS SYA'BANI ARLAN - NI MADE MUSIYANI ANJASMARI

Amuntai : CV. HEMAT, 2023 — Cetakan III , Edisi Revisi

vi + 73 hal ; 13,5 x 20

ISBN 978-602-1685-76-1

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip isi buku, tanpa seizin penerbit / pengarang.

KUTIPAN PASAL 72

Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan buku ini dan ada di hadapan pembaca sekalian. Salawat dan salam marilah dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para zuriyat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Inilah wujud dari dari pengabdian penulis sebagai akademisi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pembaca, dan buku ini disusun sebagai satuan acara perkuliahan penulis sendiri saat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Bab I membahas tentang Pendahuluan yang berisi tentang pengertian-pengertian dari Ekologi, Administrasi Negara, dan Ekologi Administrasi Negara. Bab II berisikan Aspek Tri Gatra (Aspek Alamiah) yaitu tentang Aspek Geografis, Aspek Sumberdaya Manusia (SDM), dan Aspek Sumberdaya Alam (SDA). Bab III menguraikan Aspek Panca Gatra (Aspek Sosial Kemasyarakatan) yakni membahas tentang Aspek Ideologi, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Pertahanan dan Keamanan, dan Bab IV mengangkat bahan berisikan Model-model Ekologi Administrasi Negara, yaitu tentang Pengertian dan Kegunaan Model, serta Bentuk/Model Ekologi Administrasi Negara.

Inilah sebagian yang bisa Penulis berikan untuk dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Tentunya buku ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangatlah Penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga kita

mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hal-hal tersebut. Amin,
Allahumma Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Amuntai, 21 Februari 2023

1 Sya'ban 1444 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - iv

DAFTAR ISI - vi

BAB I PENDAHULUAN - 1

- A. Ekologi - 1
- B. Administrasi Negara - 4
- C. Ekologi Administrasi Negara - 7

BAB II ASPEK LINGKUNGAN ALAM (TRI GATRA) 13

- A. Geografis - 13
- B. Sumber Daya Manusia - 17
- C. Sumber Daya Alam - 21

BAB III ASPEK SOSIAL-KEMASYARAKATAN (PANCA GATRA) - 27

- A. Ideologi - 27
- B. Politik - 30
- C. Ekonomi - 34
- D. Sosial Budaya - 37
- E. Militer (Pertahanan dan Keamanan) - 41

BAB IV MODEL-MODEL EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA - 49

- A. Pengertian dan Kegunaan Model - 49
- B. Model-Model Ekologi Administrasi Negara - 57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ekologi

Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, secara etimologis kata tersebut berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *logos* yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu kerumahtanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi yang secara harfiah berarti ilmu dan aturan rumah tangga; *nomos* berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terlibat ekonomi dan sebaliknya, dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi, meskipun kerap kali nama ekologi tidak disebut.

Rumah sudah barang tentu mempunyai lingkungan di sekitarnya yang memiliki pengaruh timbal balik makhluk hidup (seperti sesama manusia, tetangga, hewan, gunung, tumbuhan) maupun benda organik (seperti tanah, pasir, gunung, bebatuan, dan lain-lain).

Ilmu dapat diartikan sebagai pengkajian, pelajaran, pembahasan, pembacaan tentang segala sesuatu, yang mengamati, meneliti, memperhatikan serta mendeteksi sesuatu. Ilmu tentang ekologi lebih luas bila dibandingkan dengan ilmu

tentang ekonomi, karena ekologi meliputi dan mengkondisikan bagaimana lingkungan diinventarisasi dan dijinakkan, selain itu juga mempelajari bagaimana pengaruh lingkungan terhadap sesuatu.

Beberapa definisi untuk ekologi misalnya antara lain:

1. Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya.
2. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup.
3. Ekologi adalah biologi lingkungan.

Bertolak dari definisi “Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya”, maka dapat diambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris, bahasa Yunani *anthropos* berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia, dan ada ilmu ekologi manusia.

Jadi unsur-unsur ekologi meliputi juga ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya dan ideologinya sendiri sebagai lima hal pokok sebagai satu kesatuan (Panca Gatra) yang dibahas dalam sosial kemasyarakatan di satu hal,

dan di lain hal meliputi pengaruh sumber daya manusia, pengaruh sumber daya alam, dan geografi (Tri Gatra).

Edward S Rogers dalam bukunya *Human Ecology and Health, An Introduction for Administration* menyebutkan bahwa: “*Ecology is the study the relation between organism and their environment*”.

Menurut terjemahan dari **Kamus Webster New World Dictionary of American Language** terbitan *The World Publishing Co* Cleveland, New York, 1962 dikatakan bahwa: “*Ekologi adalah cabang dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antarkehidupan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, yang dalam ilmu kemasyarakatan perhubungan antarpenyaluran kelompok-kelompok manusia tersebut dengan penerangan sumberdaya alam berakibat terhadap pola kemasyarakatan dan budaya*”.

Menurut **J W Bews** (*Human Ecology, Oxford University Press, London, 1935*) yang diterjemahkan sebagai berikut: “*Perkataan itu sendiri (ekologi) adalah berasal dari bahasa Yunani, ‘oikos’ suatu rumah tangga atau tempat tinggal, sama dengan akar kata dari ekonomi dan ilmu-ilmu ekonomi. Ekonomi adalah suatu subyek yang biasa berkenaan dengan ekologi, tetapi ekologi lebih luas jangkauannya, hal tersebut berkenaan dengan seluruh antarhubungan dari*

mahluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka”.

Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan* mengatakan bahwa: *“Ekologi adalah suatu tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbang balik yang berguna) antara suatu organisme dengan lingkungan sekitarnya”.*

Fuad Amsyari dalam bukunya *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup* mengartikan bahwa: *“ilmu Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara suatu organisme dengan lingkungannya”.*

Komaruddin dalam *Ensiklopedia Manajemen* menyatakan bahwa: *“Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan interrelasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya”.*

Dari beberapa uraian tersebut terlihat bahwa ekologi berkenaan dengan kehidupan makhluk dan juga berkenaan dengan kehidupan ilmu-ilmu sosial seperti keberadaan ilmu negara, pemerintahan, politik, hukum ekonomi dan administrasi.

B. Administrasi Negara

Dimock dan **Dimock** (1992:20) menyebutkan bahwa

administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Sehingga ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya. Sejalan dengan pendapat di atas, **Miftah Thoha** (1997:10) mengemukakan bahwa ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara.

Dwight Waldo (1996:17) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara juga merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

George J Gordon menyatakan bahwa administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

Edward H Litchfield mengatakan bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-

macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Sehingga administrasi negara itu mempunyai pengertian-pengertian pokok, yaitu:

1. Administrasi negara sebagai fungsi/tugas pemerintah;
2. Administrasi negara sebagai aparat/aparatur pemerintah;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis pengerjaan.

Menjalankan administrasi negara artinya menjalankan dan melaksanakan keputusan pemerintah yang pada saat ini tidaklah mudah karena:

1. Negara modern masa kini merupakan organisasi modern yang serba kompleks (sosial, budaya, politik, ekonomis, teknis);
2. Masyarakat masa kini, apalagi masyarakat campuran dan transisional seperti masyarakat Indonesia, menghendaki administrasi negara yang bermutu profesional (objektif, beretos, dan memenuhi syarat-syarat teknis yuridis yang tinggi). Negara modern merupakan organisasi modern, artinya organisasi yang berorientasikan produksi, produktivitas, dan efisiensi.

Dari segi ilmu administrasi, administrasi negara adalah administrasi yang mengejar cita-cita tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah, melalui perundang-undangan dan

dalam bentuk hukum publik lainnya. Oleh karena itu, bersifat publik atau kenegaraan.

C. Ekologi Administrasi Negara

Ekologi administrasi negara membahas hubungan-hubungan organisasi, antara lingkungan eksternal dan internal, dan kekuatan-kekuatan yang menentukan perubahan interdependensi (saling ketergantungan). Ekologi administrasi negara dipinjam dari istilah biologi, yang telah lama membicarakan hubungan mutualistis antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi humaniora adalah pendampingnya yang agak bersifat sosiologi.

Dalam arti luas, ekologi administrasi negara memfokuskan pada kehidupan kolektif dalam suatu himpunan dan tidak dalam tindakan atau nilai individual. Ekologi administrasi negara banyak bermanfaat dalam studi perbandingan sistem-sistem administrasi. **Frederick W Riggs** dan **Ferrel Heady** menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga administrasi akan lebih mudah dipahami, jika dilakukan dengan mengidentifikasi mengenai kekuatan yang melingkarinya, lembaga-lembaga dan kondisi yang membentuk dan mempengaruhinya.

Bahwa dampak lingkungan terhadap pola-pola administrasi, namun ekologi administrasi negara banyak menghadapi problem. Misalnya bagaimana caranya mengasingkan dan mengukur dampak ekologi terhadap sistem administrasi. Sekiranya faktor-faktor ekologi administrasi negara yang begitu banyak itu berbeda dan mempunyai kekuatan yang saling berbeda pula, maka harus dicari cara melakukan perbandingannya kemudian. Selanjutnya dalam hal apa ekologi administrasi negara mempengaruhi usaha-usaha untuk menemukan universalitas prinsip-prinsip administrasi dan perilaku administrasi.

Ekologi administrasi negara menggunakan berbagai macam disiplin dan diatur secara lintas struktural. Pada hakikatnya ekologi administrasi negara hanya dapat diterapkan pada situasi yang nyata. Kehadiran ekologi administrasi negara tidak bisa diremehkan, karena juga mempunyai andil dalam memberikan bobot ilmiah pada administrasi negara.

Karena ekologi administrasi negara bersifat *eklektis* (campuran), para ahli berbagai kalangan antropologi, sosiologi, sejarah, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya, ikut menyumbang terciptanya konstruksi model ekologi administrasi negara dalam studi perbandingan administrasi negara. Berbagai model dan tipologi telah diajukan dalam usaha untuk memperbandingkan

sistem-sistem administrasi negara.

Beberapa tujuan dari mempelajari ekologi administrasi negara, antara lain:

1. Mengetahui ciri-ciri dari suatu masyarakat, bangsa dan negara;
2. Memahami timbul dan berkembangnya suatu sistem administrasi negara dalam masyarakat suatu negara;
3. Memahami suatu kondisi masyarakat, bangsa dan negara dalam menyusun dan mengembangkan suatu sistem administrasi negara yang cocok dengan kondisi masyarakat, bangsa dan negara tersebut.

Frederick W Riggs menekankan pada model keseimbangan yang banyak mengetengahkan pada faktor-faktor sosial yang merupakan faktor-faktor ekologi administrasi, antara lain: dasar ekonomi, struktur-struktur sosial, jaringan komunikasi, pola-pola ideologi, dan sistem politik yang dianut.

John Mc Gaus dan **Felix A Nigro** membagi 2 (dua) faktor ekologi administrasi negara, yaitu: faktor sosial budaya dan faktor fisik (tempat, penduduk, teknologi).

S Pamudji membagi faktor-faktor ekologi administrasi negara yakni faktor fisik/alamiah (geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk), dan faktor sosial (politik, sosial budaya, ekonomi, ideologi dan militer).

Hubungan antara administrasi lingkungan, ekologi administrasi, administrasi pembangunan, dan pembangunan administrasi adalah:

1. Pembangunan perlu diadministrasikan agar efisien dan efektif sehingga perlu adanya administrasi pembangunan;
2. Keberhasilan administrasi pembangunan bergantung pada kemampuan administratif suatu bangsa. Jika kemampuan administratif suatu bangsa itu rendah, maka administrasi harus dibangun (diperbaharui, dibina), sehingga perlu adanya konsep pembangunan administrasi;
3. Kondisi administrasi suatu bangsa bergantung pada lingkungannya. Lingkungan dapat mempengaruhi sistem administrasi, sehingga perlu adanya studi tentang pengaruh lingkungan yakni ekologi administrasi.

Jika lingkungan administrasi lemah, sistem administrasi pun lemah. Oleh karena itu, lingkungan administrasi perlu dibangun atau dikelola, atau dengan kata lain diadministrasikan, sehingga perlu adanya administrasi lingkungan.

Dalam kesehatan masyarakat (*public health*) sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan disebutkan bahwa lingkungan (*environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia

dan masyarakat.

Gordon dan **Le Riche** menyebutkan bahwa antara manusia sebagai penjamu bibit penyakit (*host*) dan bibit penyakit (*agent*) itu sendiri merupakan sebuah timbangan dengan titik tumpuannya adalah lingkungan (*environment*). Hal inilah yang disebut *medical ecology* sebagai patokan apakah seseorang itu dalam keadaan seimbang (sehat) atau tidak seimbang (sakit).

Lingkungan itu terdiri atas:

1. Lingkungan fisik (berupa tanah, air, dan udara di sekitar kita);
2. Lingkungan biologi (yaitu flora dan fauna di sekitar kita);
3. Lingkungan sosial (yakni sosial ekonomi, budaya, dan psiko manusia di sekitar kita).

Kesemua lingkungan tersebut merupakan pakaian bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan keadaan, situasi, kondisi dan toleransi bagi kita. Jadi, meliputi rumah, pekarangan, kebun, binatang peliharaan, makanan, pakaian, perkakas, dan lain-lain.

Melihat uraian di atas maka khusus untuk administrasi negara tentunya ekologi yang ada meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan fisik (yaitu geografi di sebuah negara);

2. Lingkungan biologi (berupa watak suatu bangsa);
3. Lingkungan sosial (yakni budaya, ekonomi, ideologi, politik, militer).

Ketiga unsur eksakta alamiah yang mempunyai pengaruh pada administrasi suatu negara disebut Tri Gatra (geografi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam), sedangkan kelima unsur sosio-kemasyarakatan tersebut di atas disebut dengan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer/pertahanan dan keamanan */ipoleksosbudmil/ipoleksosbudhankam*).

Jadi, Ekologi Administrasi Negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

BAB II

ASPEK LINGKUNGAN ALAM

(TRI GATRA)

A. Geografis

Faktor-faktor yang berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategis (*strategic frontier*), desakan penduduk (*population pressures*), daerah kepulauan (*sphere of influence*) dan lain-lain sangat mempengaruhi pemerintahan. Kendati seluruh faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam geografi. Karenanya terdapat hubungan yang erat pula antara ilmu administrasi negara dengan ilmu bumi yang ditujukan pada keberadaan administrasi negara terutama ekologiannya.

Sebagai contoh dari pengaruh-pengaruh tersebut yaitu untuk menentukan apakah suatu administrasi negara itu harus diciptakan sentralisasi yang kaku terpusat, atau desentralisasi yang berlebihan dengan pemberian pendemokrasian yang besar kepada daerah, sampai tampak bukan lagi subsistem tetapi seperti negara yang berdiri sendiri. Untuk efisiensi kerja digunakan asas desentralisasi untuk daerah kepulauan. Sedangkan untuk daerah kontinental digunakan asas sentralisasi karena mudah dilaksanakan pengawasan dan relatif ada

kemudahan transportasi. Daerah dengan kecenderungan

penduduk yang homogen lebih baik menggunakan asas sentralisasi, dan daerah dengan penduduk yang heterogen sebaiknya menggunakan asas desentralisasi. Jadi bagaimana ilmu administrasi negara melihat hubungan antara lingkungan sekitar tempat para aparat pemerintahan berpijak dengan administrasi negara itu sendiri akan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geografis di satu pihak (Tri Gatra), sedang di pihak lain meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Panca Gatra) yang akan menjadi ekologi administrasi negara, karena ekologi administrasi negara adalah hubungan ilmu administrasi negara dengan lingkungan alam sekitarnya baik fisik maupun sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan letak geografi maka negara dapat dibedakan dalam negara daratan yaitu negara yang dikelilingi daratan (Laos, Afghanistan, Swiss, Uganda), dan negara lautan yaitu negara yang dikelilingi lautan yang terdiri dari negara kepulauan (*archipelago state*), negara pulau (*island state*), dan negara yang mempunyai bagian wilayah yang bersifat kepulauan.

Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya harus lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi

daratannya.

Bentuk, keadaan dan lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Wilayah geografis sangat penting bagi tegaknya suatu negara, seperti rakyat Palestina di Jalur Gaza yang menuntut hak kemerdekaannya bahwa tanah yang dikangkangi Israel adalah wilayah milik mereka, India dan Pakistan yang masih memperebutkan wilayah Kashmir, serta Rusia yang bagaimanapun berbeda agama dengan negara-negara Islam yang diinjaknya, terus-menerus mengintimidasi negara-negara tersebut. Ini berarti wilayah memang sangat perlu dan mempunyai potensi yang handal untuk dikembangkan.

Potensi dan lokasi geografi suatu negara sangat menentukan peranan negara tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingga juga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang akan dihadapi.

Letak suatu wilayah juga merupakan potensi yang mapan, contohnya negara kota seperti Singapura sangat tepat untuk bongkar muat barang dan penggudangan barang yang lewat dari Asia ke Eropa atau sebaliknya, sehingga andai dibuka Semenanjung Kra (seperti halnya Terusan Suez dan Terusan Panama) mengakibatkan kematian negara kecil ini.

Itulah sebabnya Singapura secara politik melirik Indonesia dan memang berhasil membeli saham Indosat. Negara Monako hanya hidup dari perjudian orang-orang Eropa yang beristirahat di Laut Tengah, sehingga Raja Reiner menikah dengan artis Grace Kelly menjadi promosi yang handal bagi Monako sebagai negara yang menjadikan perbuatan kurang terpuji itu sebagai asetnya.

Semua aspek potensi wilayah harus dapat diidentifikasi terutama faktor-faktor dominannya. Pembahasan yang bersifat menyeluruh tetapi cukup menyatu dalam usaha mentransformasikan potensi wilayah harus dikaji secara mendalam. Letak strategis geografi dapat dirinci lebih lanjut dalam sejumlah faktor yang cukup dominan, seperti untuk menguasai perdagangan, lalu lintas laut, darat dan udara, serta daya tarik pariwisata, sehingga dapat diperhitungkan kondisi morfologi dan topografinya serta peruntukan tata ruang yang lain.

Kekayaan alam yang terkandung dalam suatu wilayah negara terutama dilihat dari klasifikasinya yaitu mineral, energi yang dimiliki, kekayaan laut, serta sumber daya buatan, kemudian perlu pula diperhitungkan beberapa deposit tersedianya sumber kekayaan alam tersebut, tingkat pengelolaannya, pola konsumsi dalam negeri dan kemungkinan

ekspor ke luar negeri, tingkat peranan pemerintah setempat dalam manajemen pemasaran dan pengelolaannya.

Wilayah merupakan lokasi atau arena tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan (darat, laut, dan udara), baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik, secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam dalam tempat tersebut.

Dunia mencatat bahwa batas wilayah suatu bangsa dan negara sudah tidak terbatas lagi yang dikarenakan karena kemajuan komunikasi di era globalisasi ini di mana sedang dicekoki oleh berbagai tekanan ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Terlihat begitu sulitnya POLRI mencegah intervensi dunia internasional (Australia dan Singapura) dalam kasus peledakan bom di negara kita. Kendati kedua negara asing ini dapat dibayangkan betapa sulitnya mereka jika RI menutup pintu gerbang Australia dan RI menggertak Singapura yang kecil, walaupun yang terjadi justru sebaliknya.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membuat suatu negara maju karena kepakaran, moralitas dan budaya

penduduknya, tetapi bisa pula hancur karena pemerintah yang berkuasa zalim dan tidak disukai rakyatnya.

Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun di luar negeri dan mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu, atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu.

Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.

Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat.

Penduduk adalah mereka yang menghuni dari suatu negara tertentu dan harus diinventarisir.

Hanya rakyat yang sama dengan warga negara, sedangkan penduduk terdiri dari WNI dan WNA yang sama-sama tinggal di tempat tersebut.

Manusia sebagai faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan suatu negara. Manusia yang tinggal di suatu negara akan menentukan apa yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional, dalam arti manusialah yang akan mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan

keamanan suatu negara. Masalah yang berkaitan dengan keadaan dan keamanan penduduk ada ialah: jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan penyebaran penduduk.

Jumlah penduduk akan berubah karena kematian (*mortalitas*), kelahiran (*fertilitas/natalitas*) dan migrasi. Apabila jumlah penduduk bertambah akan bertambah pula tenaga kerja yang akan dimanfaatkan untuk produksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan.

Pertambahan penduduk harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan kerja agar kapasitas produksi meningkat, sebab bila tidak, akan menambah pengangguran dengan segala dampaknya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, seks, agama, etnis, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Komposisi penduduk menurut umur banyak mempengaruhi karena jika prosentase kelompok umur terbesar pada umur produktif akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nasional.

Penyebaran penduduk berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional, karena penyebaran penduduk akan berpengaruh langsung terhadap tersedianya personil yang mampu menyelenggarakan

kesejahteraan yang merata. Sehingga penyebaran penduduk itu perlu merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan secara merata di seluruh wilayah negara.

Namun pada realitanya manusia ingin selalu bertempat tinggal di daerah yang memungkinkan jaminan kehidupannya yang maksimal, sehingga menjadi penyebab kepadatan penduduk tidak merata. Pemerintah perlu melaksanakan berbagai program seperti transmigrasi dan penyebaran pembangunan pusat industri.

Dari sekian banyak penduduk yang berada di suatu tempat atau negara atau daerah tidak semuanya dapat dipekerjakan sebagai karyawan, ketika negara mewajibkan untuk para karyawan minimal berpendidikan SLTA/ sederajat tentunya sudah harus berumur 18 tahun. Sebaliknya bila batas usia kerja adalah 55 tahun, maka usia produktif berkisar dari 18 tahun sampai dengan 55 tahun. Walaupun ada saja perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai karyawannya demi menekan biaya upah pekerja.

Batas usia kerja menerapkan angkatan kerja yang memadai untuk diterima pada suatu kantor, pabrik, dinas, unit pemerintah/swasta, yaitu tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dalam arti berbadan sehat tidak cacat tubuh, tidak buta warna dan tuna rungu, sedangkan sehat rohani

berarti tidak sakit jiwa, bukan memakai narkoba.

Dengan melihat keberadaan kondisi daerah, investasi dan dana yang tersedia, serta kemungkinan penerapan teknologi modern penerimaan pegawai daerah baru, maka Pemerintah Daerah dapat menawarkan standar gaji, syarat tertentu yang diminta dan berbagai jaminan lainnya. Dengan demikian Pemerintah Daerah akan menjadi pihak yang sportif.

Masyarakat diharapkan dapat menyukseskan pendidikan yang memenuhi syarat, pengalaman yang luas dan keterampilan yang handal, dan mampu berpartisipasi di bidang pelayanan masyarakat. Lalu dilaksanakan testing seoptimal mungkin untuk mengantisipasi nepotisme dan kolusi.

C. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah berupa flora dan fauna yang dimiliki dan hasil tambang, keindahan pariwisata, serta sawah ladang yang dimiliki. Sumber daya alam di Pulau Malvinas yang diperebutkan Inggris dan Argentina, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dirampas Malaysia dari RI, dan lepasnya Provinsi Timor Timur menjadi negara Timor Leste oleh karena adanya opsi referendum Presiden B J Habibie. Bahkan karena keterikatan harta kekayaan sebagian pemimpin RI, bangsa ini bertekuk lutut kepada Malaysia walau negeri

jiran ini mencuri ikan di wilayah laut kita.

Kekayaan alam merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, laut, dan di udara dalam wilayah negara yang dapat diperinci menjadi kekayaan alam hewani, nabati dan tambang. Berdasarkan sifatnya kekayaan alam dibagi atas kekayaan alam yang dapat diperbaharui (hutan, hewan) dan yang tidak dapat diperbaharui (tambang). Kekayaan alam berdasarkan keberadaannya terdapat di atmosfer (oksigen, sinar matahari), di permukaan bumi (flora, fauna), dan di dalam bumi (tambang).

Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan kekayaan alam ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Bila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi maka negara tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari negara lain dengan berbagai cara.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan itulah sering timbul permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya dan militer. Pemanfaatan kekayaan alam yang tidak produktif akan mengundang campur tangan negara lain terutama dari negara

industri yang membutuhkan bahan baku bagi industrinya.

Banyak kota dan tempat di tanah air kita salah satu pendapatannya bersumber dari obyek pariwisata. Selagi manusia hidup akan selalu membutuhkan hiburan apalagi di zaman sekarang ini. Dahulu tidak dikenal permainan di atas air, di lereng gunung bahkan di atas salju. Gunung sebagai tempat yang dianggap keramat sekarang sering didaki sebagai upaya penyegaran kondisi fisik dan psikis. Laut penghalang perjalanan sekarang menjadi tempat memancing dan bermain ski. Bekas kuil pemujaan zaman dulu atau benteng-benteng bahkan senjata-senjata peninggalan masa perang sudah menjadi obyek pariwisata yang ramai dikunjungi untuk belajar atau hanya sekedar hiburan.

Kota-kota atau tempat-tempat seperti Prapat, Ngarai Sianok, Kebun Raya Bogor, Pelabuhan Ratu, Keraton Yogya, Pemakaman di tebing Tana Toraja, Pura persembahyangan di Bali, Museum Asmat, gua persembunyian tentara Jepang di Pulau Morotai, wisata alam di Loksado, Pasar Terapung di Lok Baintan dan di Kuin. Bahkan bagian dari suatu negara seperti Monako, Las Vegas, dan Hawaii dengan pantai Waikiki yang hidupnya tergantung pada jasa turisme.

Setidaknya ada unsur-unsur penarik dari obyek pariwisata yakni segi kehidupan alam (strategis), segi sejarah

(historis), dan segi budaya (kultural). Walaupun selama ini mayoritas orang beranggapan bahwa daya tarik pariwisata hanya bersifat hedonistik dan materialistik lalu menjadi sekularistik seperti unsur 5 S yaitu *see* (melihat pemandangan yang indah), *sun* (matahari yang indah di saat terbit ataupun terbenam), *sand* (pasir di laut), *smile* (senyum ramah masyarakat suatu tempat), dan *seks* (penyediaan hiburan berupa pelacuran dan/atau perjudian).

Perlu dibina kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya, sehingga tercapai nilai guna (efektivitas) yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat demi keamanan nasional.

Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, agar dapat mengatasi kerawanan dan hakikat ancaman yang mungkin timbul. Untuk mencapai maksud tersebut maka pengolahan kekayaan alam harus berdasarkan asas-asas:

- 1) Maksimal, karena kekayaan alam harus memberi manfaat maksimal untuk masyarakat dan pembangunan;
- 2) Lestari, sehingga sumber kekayaan alam dapat dimanfaatkan selama mungkin dan tidak merugikan generasi mendatang;

- 3) Daya saing, untuk mengurangi ketergantungan dari negara lain.

Sumber daya alam bisa membawa berkah (*bless*) atau sebaliknya, *curse*. Karena itu, manajemen sumber daya alam harus mematuhi sejumlah prinsip-prinsip tertentu pula. Penerapan prinsip asimetri, khususnya yang berkaitan dengan tingkat *governability* dan prinsip-prinsip lain –*good governance* atau *producer-friendly institutions*-- menjadi lebih krusial dalam kaitannya dengan desentralisasi manajemen sumber daya alam.

Asimetri informasi berdampak terhadap posisi tawar pemerintah dan perusahaan nasional *vis a vis* perusahaan asing atau antara penduduk dan tiga aliansi (perusahaan asing, nasional, dan pemerintah). Tiga aliansi ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada penduduk, sehingga penduduk tidak memiliki kontrol apapun terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kontrol ini semakin lemah, karena pemerintah sebagai agen dari penduduk (*principal*) lebih memperhatikan kepentingan perusahaan asing dan nasional, serta dirinya sendiri.

Berdasarkan prinsip desentralisasi asimetris, terutama aspek *governability*, sebuah urusan atau wewenang dalam desentralisasi manajemen sumber daya alam dapat dikelola kembali oleh pusat, karena daerah tidak mampu menyelenggarakannya, atau pusat menilai penyelenggaraan urusan/wewenang tertentu oleh daerah menimbulkan dampak negatif secara sosial dan ekonomi.

Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan disebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun.

Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak terhadap format desentralisasi yang dibangun suatu negara.

Format desentralisasi yang terlalu menggeneralisasikan (desentralisasi homogen/simetris) sering menjadi pilihan suatu negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerah, karena mempermudah kontrol pemerintah pusat.

Namun terkadang sering terjadi masalah kerana terlalu dipaksakan walaupun tidak sesuai kebutuhan, akhirnya inefisiensi lah yang terjadi. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka format desentralisasi heterogen (asimetris) dijadikan alternatif kebijakan dalam mengatasi keterbatasan.

BAB III
ASPEK SOSIAL-KEMASYARAKATAN
(PANCA GATRA)

A. Ideologi

Ideologi suatu negara adalah diartikan sebagai *guiding of principles* atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

- a. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
- b. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
- c. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
- d. Aktualisasi ideologi dikembangkan kearah keterbukaan dan kedinamisan.

- e. Ideologi Pancasila mengakui keaneragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
- f. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, relijius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Ideologi suatu bangsa akan berperanan sebagai pedoman bangsa tersebut dalam mengisi kemerdekaannya untuk mencapai tujuan nasional. Ideologi ada yang berasal dari luar dan ada yang digali dari bangsa yang bersangkutan yang dikristalisasikan sebagai bahan ajaran untuk digunakan sebagai pedoman dan pemberi arah bangsa tersebut dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Ideologi dapat diartikan sebagai serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar serta memberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ideologi

bisa juga diartikan sebagai perangkat prinsip pengarah (*guiding principle*).

Kekuatan suatu ideologi terletak pada hal-hal berikut, yaitu:

1. Rangkaian nilai yang terdapat di dalamnya yang dapat menampung dan memenuhi aspirasi hidup dan kehidupan manusia yang menganutnya baik sebagai perorangan atau sebagai masyarakat;
2. Penghayatan dan pengamalan ideologi oleh warga negara dalam bentuk:
 - a. Pelaksanaan obyektif, yaitu pelaksanaan ideologi yang dituangkan dalam konstitusi, UU/peraturan-peraturan, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara;
 - b. Pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan ideologi oleh pribadi perseorangan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Semakin akurat rangkaian nilai dari ideologi dan semakin baik pelaksanaannya maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan nasional di bidang ideologi.

Ideologi juga diterjemahkan sebagai sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para pemikir negara serta kemudian

menyebarnya secara resmi sebagai dasar negara.

Di dunia ini ada 3 (tiga) kutub ideologi (paradigma), yaitu Sosialisme Komunis, Liberalisme Kapitalis, dan Paradigma Islam.

Fanatisme buta atau hanya ikut-ikutan para pemimpin pemerintahan suatu negara, bagaimana pun sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem perekonomian, sistem administrasi dan sistem sosial lainnya, akan cenderung dipengaruhi dan berkiblat pada salah satu ideologi tersebut.

B. Politik

Politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila yang selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan

pemerintah. Pemerintah akan menentukan sistem politik yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kehidupan politik dibagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu:

1. Sektor masyarakat yang berfungsi memberikan *input* berupa aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat;
2. Sektor pemerintah berfungsi sebagai *output* yang kebijakan yang melahirkan UU/peraturan-peraturan yang merupakan keputusan politik.

Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan politik dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara *input* dengan *output*. Kekuatan sistem politik terletak pada keseimbangan dan keserasian yang dinamis antara *input* dengan *output* sesuai dengan situasi dan kondisi negara. Keseimbangan dan keserasian antara *input* dan *output* tersebut akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional suatu negara.

Apabila *output* lebih dominan dalam sistem politik akan menggambarkan suatu bentuk pemerintahan otoriter atau diktator, sebaliknya apabila *input* lebih dominan akan menggambarkan bentuk pemerintahan liberal.

Administrasi negara hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh pemerintah melalui negara sebagai badan

politik. Apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah mengenai negara merupakan politik. Politik selalu terdiri atas strategi dan *policy*, dan selalu menyangkut permainan kekuatan dan kekuasaan. Permainan politik dilakukan oleh orang-orang yang sering tidak dapat memisahkan dirinya sebagai pejabat pemerintah, warga negara, suku, keluarga besar, golongan dan sebagai manusia pribadi yang berpikir, berperasaan, dan mempunyai kepentingan hidup.

Memang sulit bagi pejabat administrasi negara, yang wajib menjalankan perintah pejabat pemerintah yang menjadi atasannya, untuk selalu menjunjung tinggi hukum, asas keadilan, dan asas efisiensi.

Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik di mana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai anggota parlemen karena "*parle*" artinya bicara, akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif inilah yang bertanggung jawab terhadap salahnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, munculnya korupsi yang

menggelapkan uang negara, terjadinya kolusi yang memenangkan tender pihak tertentu yang melakukan penyogokan, dan terjadinya nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dalam mengisi jabatan lowong di pemerintahan, kritik legislatif dalam mosi tidak percaya yang biasanya disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban jabatan. Maka hal ini kemudian membuat pemerintahan berjatuh-baik bupati maupun kepala bagian sekretariat daerah dalam tugasnya, akan berakibat terhadap terhambatnya berbagai lajunya pembangunan ekonomi dan tersendatnya gaji pegawai.

Sebaliknya bila dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, di mana pihak eksekutif mengebiri pihak legislatif karena bahkan ada anggota legislatif adalah isteri dan anak aparat eksekutif yang tidak mungkin mengkritik kepala rumah tangganya sendiri, sehingga akhirnya pihak legislatif dikenal dengan istilah yaitu 7 D (datang, duduk, diam, duit, dengar, dengkur, dosa), artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sidang tetapi memperoleh honor yang lumayan besarnya. Itulah yang membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif.

C. Ekonomi

Administrasi negara harus dijalankan secara efisien dalam mempergunakan (mengerahkan) sumber daya manusia, finansial, dan fisik, menghasilkan jasa-jasa administratif menuju tercapainya misi atau tujuan tiap-tiap unit organisasi administrasi negara.

Perhitungan dan pertimbangan ekonomis tidak dapat dihindarkan karena masalah efisiensi adalah masalah ekonomis. Tujuan administrasi atau manajemen bukanlah efisiensi. Tujuan administrasi adalah membuat organisasi berfungsi efektif secara keseluruhan agar tugas, fungsi, dan misinya terlaksana dan tujuannya tercapai secara sebaik-baiknya.

Sifat dan tujuan setiap manajemen ditentukan oleh administrator dan menjadi tugas kewajiban tiap-tiap manajer yang bersangkutan. Tujuan manajemen adalah membuat agar segala yang diperintahkan atau ditetapkan sebagai tujuan benar-benar tercapai.

Kegiatan ekonomi adalah keseluruhan kegiatan pemerintahan dari masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi (SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) dan distribusi barang dan jasa hasil produksi demi kesejahteraan rakyat baik fisik material maupun mental spiritual.

Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.

Keadaan perekonomian suatu negara adalah pencerminan dari keseimbangan atau keselarasan antara faktor produksi dengan distribusi hasil produksi. Peningkatan kapasitas produksi berarti peningkatan volume, penguasaan teknologi baru, keterampilan kerja, kepemimpinan dan perluasan lapangan kerja.

Kelangsungan ekonomi hakikatnya ditujukan kepada faktor produksi dan pengolahannya, sehingga pembinaan ekonomi merupakan penentuan kebijaksanaan pembinaan faktor produksi dan pengolahannya di dalam produksi barang dan jasa serta distribusi hasil produksi, baik di dalam negeri maupun hubungan dengan luar negeri.

Ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bumi dan sumber alam, tenaga kerja, modal,

industrialisasi, teknologi, hubungan ekonomi luar negeri, prasarana, dan manajemen.

Penghasilan minyak dan gas bumi, bauksit, emas, batu bara, sayur-mayur, padi, kapas merupakan kekayaan alam yang mendongkrak perekonomian negeri ini. Namun ada saja bagian dari bangsa ini mati bunuh diri, ditolak di rumah sakit untuk pengobatan dan perawatan karena tidak mampu membayar uang muka, pengangguran merajalela karena banyak usia sekolah tidak bisa kuliah, dan lain-lain.

Jumlah penduduk miskin yang semakin tidak ada tanda-tanda berkurang yang bermula dari ketidakadilan pemimpin bangsa ini (pemimpin politik dan pemimpin ekonomi) yang dalam pemilu kepala daerah atau anggota parlemen dengan menghabiskan uang milyaran rupiah dan kemudian mengeruk proyek melalui famili dan koleganya yang dimenangkan dalam tender. Rekrutmen tenaga kerja tidak pernah lagi transparan menambah carut marut kondisi bangsa ini.

Kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) sudah marak dan kerap kali menjadi *headline news* di media massa, seperti tindakan para pelaku korupsi di kalangan eksekutif , legislatif dan yudikatif yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi pontang-panting menyelamatkan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit.

Karena pemerintahan dalam arti luas juga berarti legislatif, yudikatif, inspektif, konsultatif dan konstitutif selain daripada eksekutif sendiri, maka tidak menutup kemungkinan korupsi, kolusi dan nepotisme melibatkan pihak-pihak pelaku KKN tersebut. Misalnya penyogokan anggota legislatif untuk meluluskan suatu UU atau Perda, terjadinya penyogokan pada pejabat yudikatif untuk meloloskan suatu perkara. Mereka yang berkeliaran untuk menghubungkan para pejabat dengan mendatangi para pemilik perkara disebut makelar kasus (markus).

D. Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan

segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Administrasi negara harus dijalankan secara efisien dalam mempergunakan (mengerahkan) sumber daya manusia, finansial, dan fisik, menghasilkan jasa-jasa administratif menuju tercapainya misi atau tujuan tiap-tiap unit organisasi administrasi negara.

Lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling beinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali oleh Penciptanya dengan budaya. Agar manusia dan budayanya itu dapat berkembang dengan sempurna, maka dia harus hidup bersama dengan manusia lain, yang disebut hidup bermasyarakat (makhluk sosial).

Hidup bermasyarakat merupakan cara memfungsikan budaya dengan berinteraksi secara teratur antara sesamanya, sehingga kepentingan bersama dapat terpenuhi secara wajar dan sempurna. Keteraturan itu tercipta karena masing-masing dari mereka mempunyai persepsi penilaian yang sama terhadap diri sendiri dan kebutuhan yang mereka kehendaki. Dengan demikian, mereka mempunyai nilai kemanusiaan yang sama dan saling menghargai.

Tujuan setiap kelompok sosial budaya berbeda-beda antara satu kelompok sosial budaya dengan kelompok sosial budaya lainnya, sesuai dengan tipe kelompok sosial budaya masing-masing.

Tujuan sosial budaya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan hidup bersama secara tertib dan damai serta sejahtera dalam wadah kesatuan geografis (komunitas desa, kota, daerah aliran sungai).
2. Membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga bahagia lahir batin dalam wadah ikatan perkawinan dan hubungan darah (keluarga, keluarga besar).
3. Mewujudkan kesejahteraan bersama, menghapuskan kemiskinan, membasmi penyakit masyarakat, dan mencegah tindakan tidak manusiawi dalam wadah kepentingan yang sama (Koperasi, LSM, Yayasan).
4. Melayani kepentingan klien atau konsumen berdasarkan keahlian profesional dalam wadah organisasi profesi (kelompok profesi iptek, kelompok pengusaha).

Sosial budaya menunjukkan 2 (dua) segi kehidupan bersama dari manusia yaitu segi kemasyarakatan dan segi

kebudayaan.

1. Kemasyarakatan

Untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus hidup berkelompok dan berhubungan dengan lingkungannya (bermasyarakat, bekerja sama satu sama lain). Hidup bermasyarakat akan lebih baik apabila diwadahi dalam suatu organisasi dan kehidupan aspirasi seluruh warga masyarakat berdasarkan falsafah bangsanya.

Dalam organisasi sosial, masyarakat menentukan norma-norma sosial yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat yang meliputi kehidupan normatif, status kelompok sosial dan institusi yang disusun berdasarkan falsafah bangsa.

Untuk memelihara eksistensinya di dalam berorganisasi sosial, anggota masyarakat harus memiliki struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial sebagai sarana komunikasi, dan standar sosial berupa norma-norma sosial.

2. Kebudayaan

Budaya adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang dimanifestasikan dalam tingkah laku yang sudah

melembaga. Tingkah laku masyarakat kebudayaan tercipta karena oleh beberapa faktor, yakni:

- a. Organ biologis manusia dalam arti kebutuhan hakiki manusia
- b. Lingkungan alam yang melahirkan kebiasaan manusia yang hidup di suatu daerah
- c. Lingkungan sejarah
- d. Lingkungan psikologis.

Masyarakat budaya akan membentuk pola budaya yang berfokus kepada satu atau beberapa fokus budaya (religi, ekonomi, edukasi, ideologi, dan lain-lain) yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Pembina sosial budaya berarti membina kemandirian kehidupan organisasi sosial masyarakat dan perkembangan kebudayaan berdasarkan Pancasila yang akan dapat mensejahterakan dan ketenteraman batin bangsa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial budaya antara lain: tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional, dan kepribadian nasional.

E. Militer (Pertahanan dan Keamanan)

Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa

Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan Nasional.

Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional

Pertahanan dan Keamanan (Hankam) adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI-POLRI sebagai intinya dalam mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Pelaksanaan hankam ialah dengan melaksanakan sistem hankam yaitu suatu sistem hankam dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat sesuai fungsi dan profesinya dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoodinasi.

Upaya meningkatkan ketahanan nasional di bidang hankam adalah peningkatan partisipasi seluruh rakyat dan seluruh kekuatan nasional sesuai fungsi dan profesinya dalam

upaya pembelaan negara.

Kekuatan hankam adalah merupakan daya tangkal yang ampuh menghadapi hakikat ancaman dari manapun datangnya.

Ketahanan Nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang hankam antara lain:

1. Doktrin

Doktrin hankam merupakan asas pedoman perwujudan sistem hankam yang mencakup:

- a. Masalah pertahanan dari invasi luar
- b. Masalah pemeliharaan keamanan dalam negeri
- c. Masalah akibat perang dingin
- d. Masalah perwujudan dan pemeliharaan kestabilan dan keamanan wilayah
- e. Masalah peran serta TNI-POLRI di luar bidang hankam.

2. Wawasan Nasional

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta hubungan antarnegara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional

Wawasan nasional yang dianut adalah wawasan yang berintikan kekompakan, kesatuan, persatuan dan keterpaduan antara pemerintah, TNI-POLRI dan rakyat.

3. Sistem Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan dan keamanan yang diperlukan adalah sistem yang merupakan perpaduan serasi antara sistem senjata teknologi (sistek) dan sistem senjata sosial (sissos).

Perang tidak hanya dimenangkan dengan sistem senjata teknologi saja, sehingga penggunaan sistem senjata sosial juga harus dilakukan dipadukan sistek.

4. Kondisi geografis negara

Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan kondisi geografisnya, diperlukan kekuatan

hankam yang disegani sekurang-kurangnya merupakan faktor pencegahan (*deterrent factor*).

Deterrent factor yang didukung oleh kemampuan Hankamnas untuk dapat dikerahkan guna menghadapi agresi yang sebenarnya dari musuh akan meningkatkan Ketahanan Nasional di bidang Hankam.

5. Manusia

Manusia yang sehat fisiknya, bersikap mental positif/bermoral tinggi, kepercayaan diri, nasionalisme/patriotisme dan jiwa korps yang kuat sebagai penentu kekuatan dan ketahanan nasional.

Manusia yang berkualitas maju dan berdaya saing tinggi akan mencapai harkat, derajat dan martabat bangsa dan unggul dan disegani bangsa lain.

6. Integrasi TNI dengan rakyat

Integrasi ini merupakan keharusan yang mutlak karena perang modern bersifat semesta mempunyai daya pemusnah yang sangat besar.

Kolaborasi mewujudkan sinergi kuat dengan kekuatan militer bersama rakyat, sehingga mengkondisikan perpaduan yang harmonis dan dinamis dalam integrasi tersebut.

7. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

PKn ditujukan untuk menanamkan kesadaran Hankamnas melalui pendidikan nasional, sebagai sarana untuk menumbuhkan keselarasan dan kemampuan berpikir, bersikap serta bertata laku secara komprehensif integral dalam rangka upaya nasional.

Kewiraan (PKn) senantiasa berupaya mencapai pendidikan berkarakter, berkeadaban, dan manusiawi lewat penerapan berbasis holistik.

8. Material

Perindustrian hankam di negara berkembang masih berada dalam peralatan dan masih banyak bergantung kepada pihak asing. Keamanan masih perlu peningkatan kerja sama dan penyesuaian antarangkatan, serta antara industri pertahanan dengan industri sipil.

Ketergantungan peralatan militer kepada luar negeri dapat mengurangi tingkat Ketahanan Nasional di bidang hankam.

9. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Negara-negara berkembang umumnya ketinggalan di bidang iptek sehingga perlunya penguasaan iptek untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat telah membawa banyak perubahan di sektor kehidupan manusia. Karenanya penguasaan IPTEK merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan manusia yang berkualitas.

10. Manajemen

Kemampuan manajerial di semua eselon perlu ditingkatkan terutama di bidang koordinasi, integrasi, penyesuaian dan penyederhanaan. Dengan anggaran terbatas bidang hankam memerlukan tingkat manajemen yang tinggi.

Tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan sendaygunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan.

11. Pengaruh luar negeri

Ketegangan dunia beralih ke wilayah negara-negara berkembang karena situasi dan kondisi (sikon) negara-negara berkembang yang sangat rawan yang mudah diganggu, dihambat atau dicampuri oleh kekuatan luar.

Sikon yang demikian membuat negara-negara besar berusaha mencari daerah pengaruhnya masing-masing.

Untuk menghambat hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan Ketahanan Nasional umumnya dan ketahanan bidang hankam khususnya, serta mengadakan kerja sama antarbangsa, agar tercipta ketahanan nasional yang mantap.

12. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan berwibawa terutama diperlukan dalam keadaan darurat, agar dapat menjamin kelangsungan hidup nasional yang merdeka dan berdaulat.

Kewibawaan suatu bangsa sebagai hasil kepemimpinan yang berwibawa akan melahirkan daya tangkal, sehingga semakin tinggi kewibawaan bangsa semakin tinggi pula daya tangkal yang dimilikinya.

BAB IV

MODEL-MODEL EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian dan Kegunaan Model

Model adalah tiruan dari suatu subyek atau sebagai orang/benda yang memiliki ukuran kesempurnaan untuk ditiru sebagai suatu rancangan.

Sedangkan model dalam ilmu pengetahuan berarti imitasi (*copy*) yang menggambarkan suatu keadaan (obyek) yang kompleks dengan penyederhanaan atau kemurnian untuk memudahkan pemahaman keadaan (obyek) tersebut. Model tersebut biasanya merupakan bentuk ideal dari keadaan sebenarnya dan dalam hubungannya dengan studi administrasi.

Secara teoritis model terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Model yang bersifat deskriptif yang hanya sekedar menggambarkan atau menuliskan apa adanya dari suatu obyek atau sistem;
2. Model yang bersifat eksplanatori yang menjelaskan faktor-faktor atau variabel-variabel penyebab dari suatu sistem administrasi negara.

Menurut **Frederick W Riggs** model menunjuk kepada suatu susunan daripada simbol-simbol dan aturan-aturan

pelaksanaan yang dibayangkan sebagai yang mempunyai pasangan dengan dunia kenyataan.

Dalam merancang model administrasi ada beberapa pendekatan administrasi negara yang menghasilkan beberapa definisi, antara lain:

1. Administrasi Negara sebagai salah satu fungsi pemerintah yang penting (**Frank J Goodnow**), yaitu:
 - a. Sebagai fungsi politik yang berhubungan dengan pernyataan kehendak rakyat;
 - b. Sebagai fungsi administrasi yaitu pembuatan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kehendak rakyat.

Jadi, Administrasi Negara adalah koordinasi usaha perseroangan atau kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, sehingga faktor-faktor ekologi yang mendorong terlaksananya administrasi secara efektif perlu dilaksanakan.

2. Administrasi Negara sebagai salah satu cabang pemerintahan yaitu Lembaga Eksekutif.

Pelaksanaan pemerintahan menganut prinsip-prinsip organisasi, sehingga organisasi suatu negara dalam

menjalankan tugas berdasarkan bagian-bagian, departemen-departemen yang disusun dari atas ke bawah secara integral berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis.

3. Administrasi Negara yang beraspek yuridis.

Organisasi administrasi diciptakan oleh hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, atau administrasi banyak mengandung unsur-unsur yuridis.

Hukum adalah untuk menetapkan kekuasaan, merinci tugas, membatasi wewenang dan menyediakan alat-alat hukum, yaitu sebagai alat kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas.

4. Administrasi Negara sebagai profesi.

Pekerjaan di bidang ini sejak lama telah menjadi lapangan kerja (profesi). Karir di bidang administrasi pun terbuka bagi siapa saja. Di Amerika terkenal dengan *American Management Association* (AMA). Di Belanda telah didirikan *Orde van Organisatie-Adviseurs* (1941). Di Indonesia telah berdiri PERSADI (Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia).

Di samping itu lembaga-lembaga konsultasi di bidang manajemen sedikit banyak memberi dorongan atas perkembangan administrasi sebagai profesi di

Indonesia.

Politik adalah tempat petualangan (amatir administrasi negara untuk mempraktikkan keahlian).

5. Administrasi Negara sebagai manajemen.

Administrasi Negara merupakan tindakan dengan maksud mencapai hubungan kerja sama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Beberapa proses dalam administrasi negara yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengawasan.

Keempat langkah tersebut berporoses dan berlangsung terus-menerus dan disebut dengan fungsi-fungsi manajemen, Proses atau siklus dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan adalah manajemen berdasarkan pendekatan mikro. Atau disebut pula dengan setiap fungsi dipandang sebagai bagian proses manajemen.

Menurut pendekatan makro manajemen adalah proses atau perputaran fungsi pengorganisasian yang dilakukan sepanjang ketiga fungsi lainnya, penggerakan dilakukan sepanjang kegiatan operasional, sedangkan pengawasan dilakukan sepanjang ketiga fungsi lainnya. Jadi dengan demikian, perencanaan perlu diawasi, dikendalikan atau dinilai, demikian pula sebaliknya

dengan fungsi lainnya.

6. Administrasi Negara sebagai seni.

Dalam praktiknya Administrasi Negara lebih bersifat seni daripada ilmu, di mana seni yang menggunakan intuisi (dengan perasaan atau perkiraan), keputusan-keputusan yang sifatnya subyektif dan kecakapan yang tidak dapat diajarkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Jayanya zaman keemasan Kerajaan Majapahit hanya semasa Maha Patih Gajah Mada (1364) dan Raja Hayam Wuruk (1350-1389), namun begitu kedua tokoh ini wafat Kerajaan Majapahit menjadi suram dan sirna.

Jika peristiwa administratif dipandang sebagai satu-satunya administrasi sebagai seni, hal ini disebut sebagai seni administrasi. Bilamana peristiwa administratif itu satu-satunya, maka tidaklah leluasa mempelajarinya, paling banter sebagai kasus.

Karenanya salah satu metode penelitian administrasi, terutama di bidang administrasi negara dianggap efektif sehingga kasus perkasus diperhatikan atau diperbandingkan yang melahirkan ilmu Perbandingan Administrasi (*Comparative Administration*). Jika kasus demikian dipola dan direkonstruksi menurut metode

kesejarahan akan ditemui ilmu Sejarah Administrasi.

Setiap kasus mempunyai kekhasan tersendiri dan terbentuk oleh keterikatan lingkungan dan budaya. Hubungan timbal balik antara satu sistem administrasi negara dengan sistem budaya menghasilkan pengetahuan yang disebut Ekologi Administrasi. Hubungan keterikatan antara sistem administrasi negara dengan sistem budaya menghasilkan Budaya Administrasi.

Kemudian bila studi administrasi terhadap peranan sistem administrasi dengan lingkungannya menghasilkan Administrasi Lingkungan (*Environment Administration*). Dan dalam pada itu perbandingan administrasi kemudian berkembang menjadi Administrasi Pembangunan.

7. Administrasi Negara sebagai ilmu.

Pemahaman dari peristiwa berulang dapat ditingkatkan dalam hal:

- a. Pengulangan dianggap sebagai kasus yang menggejala, selanjutnya dengan mempelajari gejala orang dapat menemukan kenyataan atau realita;
- b. Peneliti dapat dengan leluasa mempelajari hubungan antargejala sehingga dapat terungkap hukum-hukum yang menguasai gejala-gejala (*scientific law*). Hukum-hukum pasti terdapat dan berlaku secara relatif maupun

mutlak.

Bilamana dari pemahaman administrasi sebagai keterampilan dapat diperoleh kemahiran teknis, maka dari segi pemahaman administrasi sebagai ilmu dapat diperoleh kemampuan konseptual. Jika memperoleh kemampuan konseptual ini akan membawa sejumlah keuntungan yang lebih besar dari kemampuan teknis, dengan kemampuan kemahiran teknis ini dapat menggunakan kemahiran administrasi.

Kemampuan konseptual akan memberi beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Memahami suatu gejala sehingga pemahaman dapat dimengerti;
- b. Menerangkan antara gejala sehingga hubungan semakin jelas;
- c. Membuat tentang ramalan yang akan datang terjadi di masa depan;
- d. Mengontrol/menguji pengetahuan yang sudah ada.

Administrasi sebagai ilmu dapat dipelajari dan diajarkan secara terbuka sehingga berkembang bak sebuah bangunan maka administrasi dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yaitu: 1) Aspek organisasi; 2) Aspek manajemen; dan 3) Aspek perilaku.

Dari aspek organisasi adalah kombinasi wadah sumber daya dan dari aspek manajemen adalah sebagai proses untuk menggerakkan sumber daya tersebut. Kedua aspek ini menurut **Leonard D White** (*The Study Public Administration, 1955*) mengibaratkan Administrasi Negara sebagai organisme hidup yang memiliki aspek anatomik yang menunjukkan segi statik dalam bangunan administrasi (disebut organisasi) dan aspek fisiologik yang menunjukkan segi dinamik (disebut manajemen).

Sedangkan aspek perilaku (*behavior*) juga berperan penting dalam keberhasilan mencapai tujuan yang bukan hanya ditentukan oleh aspek anatomik dan fisiologik saja, sebab bila kedua aspek saja diumpamakan seperti orang tidur, tetap hidup tetapi tidak produktif. Sehingga aspek-aspek administrasi, organisasi, manajemen dan perilaku dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam proses administrasi.

8. Administrasi Negara sebagai proses.

Meliputi seluruh gerak-gerik manusia saat penentuan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan pencapaian tujuan tersebut.

Dalam penentuan faktor-faktor ekologi administrasi negara, bahkan sering merupakan suatu masalah, terutama

faktor-faktor yang relevan dengan administrasi negara atau administrasi niaga. Oleh karena itu sering terjadi kesimpulan-kesimpulan yang ditarik tentang lingkungan khususnya ekologi administrasi negara.

B. Model-model Ekologi Administrasi Negara

Meningkatnya minat masyarakat menjadi pegawai negeri atau masuk ke jajaran administrasi negara disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi berhubungan dengan sempitnya lapangan kerja, sedangkan faktor sosial berhubungan dengan prestise atau harga diri. Penentuan ini sulit karena perlu kejelian baik dalam penglihatan maupun ketajaman analisa. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan tersebut diperlukan model sebagai alat analisa.

Perlunya analisa adalah disebabkan karena:

1. Banyaknya faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi administrasi, sehingga perlu dilakukan penentuan faktor-faktor esensial dan nonesensial.
2. Hal ihwal administrasi yang kompleks bila dikaitkan dengan tinjauan ekologis, karena antara faktor-faktor ekologis satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Untuk kepentingan analisa berbagai model biasanya dapat diklasifikasikan, seperti berikut ini:

1. Model ikonis

Model ini melukiskan atau apa yang mempergunakan dengan gambar atau secara visual aspek-aspek tertentu daripada suatu obyek atau sistem.

2. Model analogis

Model yang menggunakan seperangkat sifat-sifat untuk melukiskan sifat-sifat lainnya yang dimiliki suatu obyek atau sistem yang dipelajarinya.

3. Model simbolis

Model yang mempergunakan simbol-simbol atau lambang-lambang untuk menunjukkan sifat-sifat obyek atau sistem yang dipelajari dengan menggunakan sistem matematis atau seperangkat persamaan yang sejenis.

Dari pandangan lain ditemukan jenis model lain, yaitu:

1. Model formal

2. Model substantif

Mula-mula kedua model ini dikembangkan dalam studi ekonomi, dan kemudian dikembangkan pula dalam

ekologi administrasi. Dalam ekonomi formal suatu pasar adalah tempat pembentukan harga, yakni sama dengan administrasi formal suatu biro.

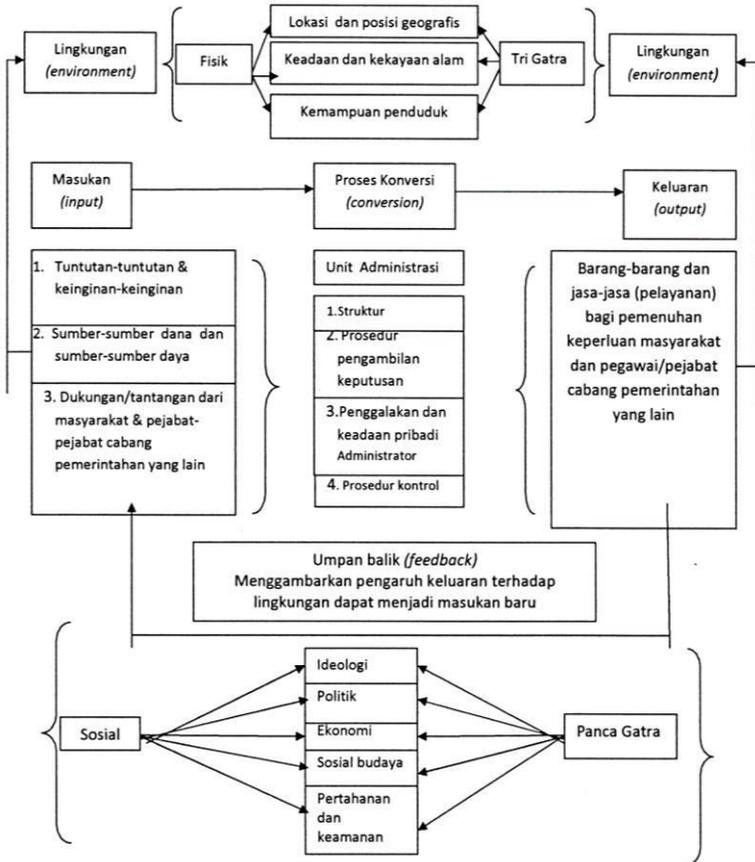
Contoh-contoh model dalam ekologi administrasi negara seperti berikut ini:

1. Model Sistem Administrasi Negara

Model ini menggambarkan sebagai proses yang terdiri dari dari *input*, proses konversi, *output* sebagai proses kehidupan administrasi dan berada dalam lingkungan (*environment*) baik secara fisik (lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan penduduk) atau disebut Tri Gatra, maupun lingkungan sosial kemasyarakatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan/militer) atau disebut Panca Gatra.

Sebagai suatu proses administrasi selalu melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan keadaan-keadaan lingkungan secara timbal balik melalui umpan balik (*feedback*).

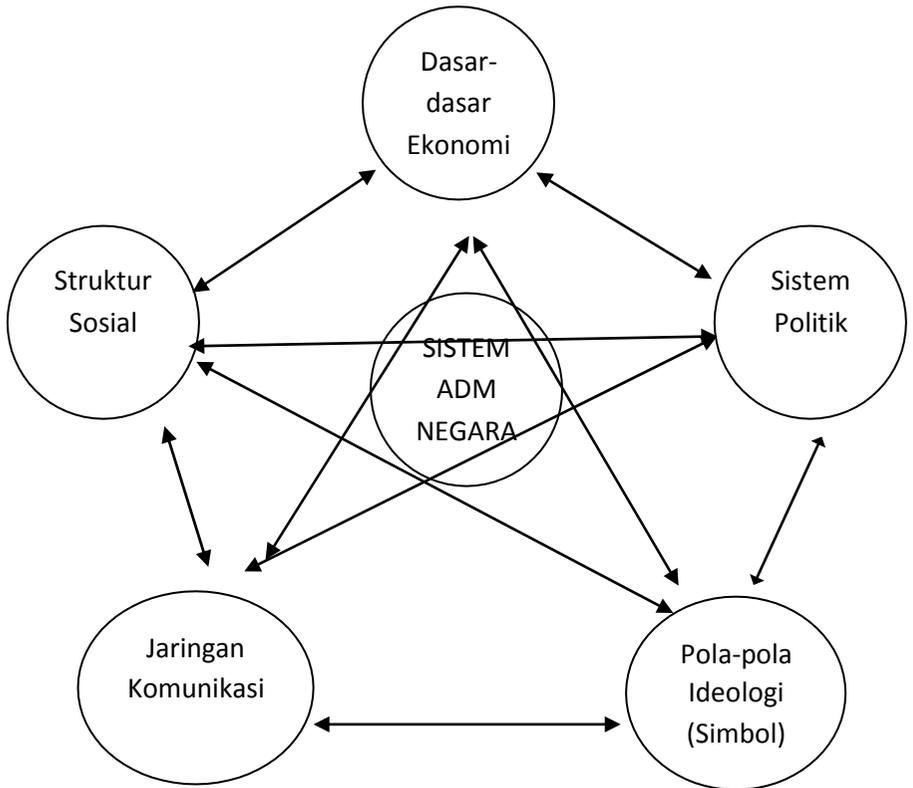
Bagan 1
Model Sistem Administrasi Negara



2. Model Keseimbangan (Fred W Riggs)

Model keseimbangan merupakan suatu model perubahan subsistem-subsistem yang lain sampai akhirnya terjadi keseimbangan.

Bagan 2
Model Keseimbangan (Equilibrium Model)



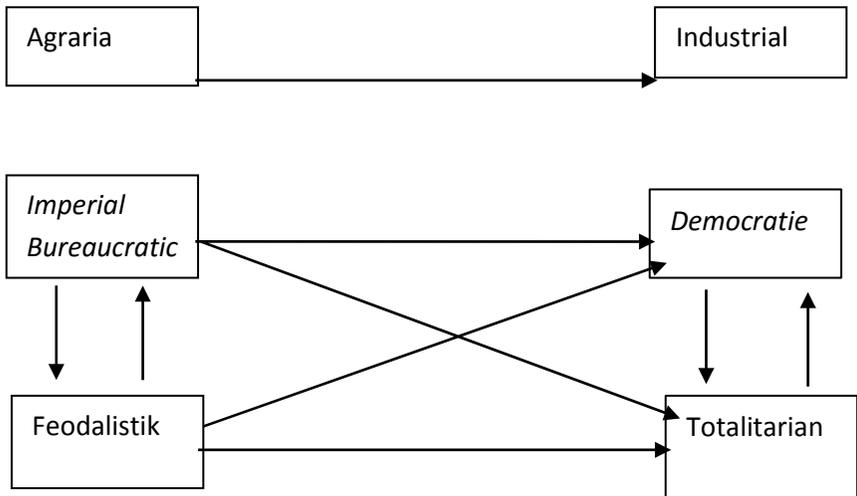
3. Model pergeseran antara agraria dengan industri (Model Perkembangan)

Pada model agraria tingkat keseimbangan lebih tinggi, dengan demikian maka keadaannya lebih stabil

dibanding model industri, di mana pergeserannya selalu ke arah industrial, sekalipun dengan jalan zigzag.

Bagan 3

Model Pergeseran Agraria-Industri (Pagan)



Suatu perubahan subsistem akan mempengaruhi subsistem-subsistem yang lain sampai akhirnya terjadi keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia

Anhar, Deli, Drs. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banjarmasin: UNISKA Press

Amsyari, Fuad. 1977. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia. Jakarta: Ghalia Indonesia

Atmosudirdjo, Prajudi. 1970. *Peranan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan

Dimock & Dimock. 1992. *Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Mufiz, Ali, Drs. 1985. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Karunika

- Muhammad, Abdulkadir, Prof., SH. 2011. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pamudji, S. 1986. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Setiadi, Elly M., DR., M.Si., et.al, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana
- Simon, Herbert A., 1970, *Administrative Behavior*, MacMillan Coy
- Sutopo, Drs., MPA., Indrawijaya, Adam Ibrahim, Drs., MPA., 2001, *Dasar-dasar Administrasi Publik*, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, et.al, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana, H., DR., M.Si., 2011, *Ekologi Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syahrani, DR., MS., 2010, *Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Daerah: Pengantar ke Isu-isu Kritis*

dalam Otonomi dan Pembangunan Daerah, Pustaka
Pelajar Yogyakarta & Prodi MAP Unlam Banjarmasin

Thoha, Miftah, 1986, *Dimensi-dimensi Prima Administrasi
Negara*, Jakarta: Rajawali

Waldo, Dwight, 1996, *Pengantar Study Public Administration*,
Jakarta: Bumi Aksara

Zauhari, Asli Munsyi, Drs., 2004, *Catatan Perkuliahan Konsep
dan Praktek Administrasi Negara*, UNISKA Press,
Banjarmasin